

# IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SARUDU DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN

**Mujibu Rahman**

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This study aims to identify and describe the Policy Implementation Unit Level Curriculum (SBC) in improving learning in SMK Negeri 1 Sarudu. This research is a qualitative descriptive study with a study population of 16 people, .Teknik data collection using observation, interview and documentation study. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that the policy implementation Unit Level Curriculum (SBC) at SMK 1 Sarudu based on the theory of Edward III, which include: Communication, Resources, disposition and bureaucratic structure in SMK 1 Sarudu suboptimal even though the policy implementation of SBC is in conformity with the standards of competence / basic competence but there are some programs that are not performing well as the development program or department areas of expertise, competence test execution and implementation of learning programs. Factors affecting less optimal for policy implementation level curriculum, among others, limited education facilities / infrastructure and support available budget and human resources seen from Aspe kkuualitas and quantity*

**Keywords:** *Policy Implementation Unit Level Curriculum Vocational High School*

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang berat, terutama berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan.

Kurikulum merupakan elemen strategis dalam sebuah layanan program pendidikan dan komponen pendidikan yang dijadikan acuan bagi segenap pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program atau setiap satuan pendidikan, baik itu oleh pengelola maupun penyelenggara khususnya oleh guru dan kepala sekolah.

Ahli kurikulum lain Mauritz Johnson (Sukmadinata,2004:4),kurikulum ”*Prescribes (or at least anticipates) the result of instruction*” kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman

dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan. Jadi kurikulum adalah suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses belajar mengajar.

Kurikulum yang baik semestinya akan menghasilkan proses dan produk pendidikan yang baik, dan sebaliknya kurikulum yang buruk akan membuahkan proses dan hasil pendidikan yang jelek pula. Kurikulum merupakan komponen penting dari sistem pendidikan. Kurikulum dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat yaitu antara kurikulum dan pendidikan mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Apabila tujuan tersebut hendak tercapai maka harus ada sarana isi yaitu kurikulum yang dijadikan dasar acuan yang relevan, artinya sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut, hal ini dapat diartikan bahwa kurikulum dapat membawa kita ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 36 ayat (1)

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Munculnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang bersifat sentralistik berubah ke pendidikan desentralistik dilatarbelakangi oleh perubahan dan tuntutan masyarakat dalam dimensi global.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan ditempuh dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan kebutuhan dimasa depan yang akan dihadapi siswa sebagai warga bangsa agar mampu berfikir global dan bertindak sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal (*think globally but act locally*).

Kantor Dinas Pendidikan Nasional pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata organisasi maupun lingkungannya, dan harus mendukung pula misi pendidikan nasional. Perubahan seperti tersebut di atas berkaitan dengan kurikulum yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian kelompok pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Dalam hal ini Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan manusia berkualitas. Sesuai dengan fungsi Pendidikan Nasional adalah

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Kurikulum memainkan peranan penting dalam pendidikan karena berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum berkenaan dengan rencana dan pelaksanaan pendidikan, baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, maupun nasional. Adanya rancangan atau kurikulum formal dan tertulis merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Kurikulum merupakan syarat esensial bagi pendidikan sekolah. Hal ini berarti bahwa kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran di sekolah.

Sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada paduan yang disusun oleh Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan diterbitkannya berbagai Permendiknas yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga harus mengacu pada Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan. Selain itu, KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dan UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005.pasal 38 ayat (2) UU RI Nomor 20

tahun 2003 menyatakan bahwa “ kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau sistem satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah”.

Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) RI Nomor 6 tahun 2007 pasal 5 butir b tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) melakukan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Disebut juga dalam panduan penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah oleh BSNP, pemberlakuan dokumen KTSP pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah menengah Atas (SMA), dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan ketahu oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Bagi satuan pendidikan yang belum siap mengembangkan kurikulum, dapat menggunakan model kurikulum yang dikembangkan oleh BSNP. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan atau diadaptasikan dengan kondisi sekolah, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat bersamaan dengan era globalisasi.

Realisasi kurikulum adalah merupakan usaha yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbudnas) untuk meningkatkan mutu

pendidikan dan lulusannya. Guru yang berperan sebagai pelaksana kurikulum, maka penerapan kurikulum di lapangan perlu ditinjau dan dievaluasi sehingga pelayanan pendidikan yang diberikan lebih optimal dan dapat menghasilkan mutu pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kesiapan guru dalam pembelajaran merupakan kunci keberhasilan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, karena kesiapan guru itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan satuan-satuan pendidikan harus mampu mengembangkan komponen-komponen dalam kurikulum. Komponen-komponen yang dimaksud adalah mencakup visi, misi dan tujuan satuan pendidikan, struktur dan muatan, kalender pendidikan, silabus sampai pada rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pada dasarnya, tujuan dari KTSP adalah bagaimana siswa dan guru lebih aktif dalam pembelajaran. Selain Siswa harus aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar, guru juga harus aktif dalam memotivasi kreativitas siswanya agar terjadi diskusi yang dinamis. Kelebihan dari pada KTSP adalah memberikan alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri siswa. Siswa tidak hanya diajarkan teori tetapi diajak untuk terlibat dalam sebuah proses pengalaman belajar.

Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan ini, menuntut setiap sekolah membuat kurikulum yang berbeda-beda. Namun dalam penyusunannya harus memperhatikan Standar isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Dalam kurikulum baru ini guru diberi otonomi dalam penjabarkan kurikulum, dan siswa sebagai subyek dalam proses belajar mengajar. Sehingga diharapkan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat memenuhi standarisasi evaluasi belajar siswa.

Namun sebagai konsep baru dalam meningkatkan kualitas kurikulum, KTSP tidak semudah yang dibayangkan dalam penerapannya. Pemerintah menargetkan empat tahun semua sekolah di Indonesia dapat melaksanakan KTSP dengan menyeluruh. Akan tetapi selama ini mayoritas sekolah-sekolah terpusat di pemerintahan pusat sehingga untuk penerapan KTSP memerlukan sosialisasi dan proses.

Di Kabupaten Mamuju Utara, SMK Negeri 1 Sarudu merupakan salah satu sekolah kejuruan yang dalam mengimplementasikan KTSP belum optimal karena belum memadainya akan tetapi berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kelulusan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu melihat Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sarudu Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dengan pendekatan Teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi.

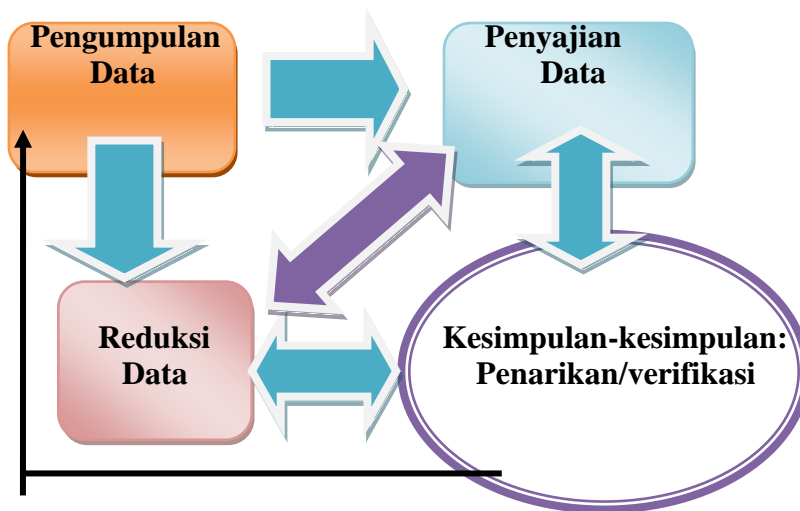
## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif di amaksudkan untuk memahami objek secara mendalam yaitu

melihat Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sarudu Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Menggali setiap tahapan kebijakan proses Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan observasi serta alat batu dokumentasi data seperti tape recorder dan kamera. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2007: 15) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Informan dalam penelitian ini terdiri Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala bagian Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ketua jurusan, Pengawas, Komite dan seorang Guru, yang di tentukan secara porposif yaitu menentukan informan yang susai kriteria yang telah di tentukan sejak awal.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, sebagaimana Miles dan Huberman (2009:18) menyatakan bahwa salah satu jenis metode analisis data kualitatif yaitu Model Analisis Interaksi. Dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.



**Gambar 1: Bagan alur interaksi metode penelitian**

Sumber : Miles dan Huberman (2009:20)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendapatkan gambaran implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan KTSP dengan Perspektif Erwad III dengan melihat beberapa indikator komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi

Indikator komunikasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting sebagai penunjang implementasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Komunikasi merupakan sarana yang dapat menghubungkan antara semua *stakeholder* yang terlibat dalam proses perumusan, pembelajaran dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP. Komunikasi bagian penting dalam memediasi berbagai persoalan yang muncul dalam proses implementasi KTSP pada SMK Negeri 1 Sarudu.

Hamdi ( 1995: 5) menyebutkan bahwa “pelaksanaan kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana”. Implementasi kebijakan

merupakan aspek paling penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji dalam Wahab (1997:59) dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting dari pada pembuatan kebijakan

Dari hasil wawancara dengan informan guru dan peninjauan secara langsung, menunjukkan bahwa komunikasi kepala sekolah kepada guru-guru tentang implementasi kebijakan KTSP pada SMK Negeri 1 Sarudu sudah optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah SMK Negeri 1 Sarudu sudah mengkomunikasikan dengan baik kepada guru-guru maupun pihak lain yang mempunyai peranan terhadap keberhasilan implementasi Kebijakan KTSP. Sangat jelas bahwa peranan Kepala Sekolah sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu kebijakan khususnya implementasi kebijakan KTSP pada SMK Negeri 1 Sarudu.

### 2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan KTSP pada SMKN 1 Sarudu tidak terlepas dari sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun finansial. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap implementasi

kebijakan, sumber daya manusia yang profesional dalam menggunakan sarana dan prasarana atau fasilitas SMKN 1 Sarudu sesuai dengan pemanfaatannya dalam melancarkan proses pembelajaran yang sesuai dengan KTSP. Terkait sumber daya manusia yang di miliki SMKN 1 Sarudu dapat di lihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Keadaan Pengajar Menurut Pendidikan pada SMKN 1 Sarudu**

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Magister (S2)	-	3 PNS
2	Sarjana (S.1)	16	
3	Sarjana Muda(D3)	-	
<b>Jumlah</b>		<b>16 orang</b>	

Sumber Data : Tata Usaha SMK Neg 1 Sarudu 2015

Manusia merupakan salah satu faktor yang mendasar dan paling dominan dalam satu organisasi. Dikatakan demikian karena unsur-unsur lainnya, seperti peralatan, dana, metode dan mekanisme kerja hanya dapat berfungsi dan bermanfaat bagi organisasi. Pada hakekatnya manusia dengan segala sumber daya yang memilikinya harus dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan yang paling strategis dalam suatu organisasi. Organisasi pendidikan tidak berfungsi dengan baik tanpa adanya keterlibatan manusia. Dengan kata lain, bahwa faktor manusialah yang paling menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi/sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan KTSP. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru-guru dalam mengimplementasi kebijakan KTSP pada SMKN 1 Sarudu.

Berdasarkan hasil wawancara, peninjauan langsung serta studi dokumentasi menunjukan bahwa tingkat kemampuan guru

dalam mengimplementasikan KTSP pada SMKN 1 Sarudu sudah memadai.. Hal ini berarti bahwa kemampuan guru pada SMKN 1 Sarudu telah memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan KTSP. Faktor individu guru sebagai pendorong terjadinya perubahan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan, hal ini terkait dengan peran guru sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan program - program pembaruan dikelas/sekolah. Atas peran strategis itu, guru harus mempunyai kesiapan untuk menerima dan melaksanakan program yang dikembangkan berdasarkan kebijakan KTSP. Kesiapan guru sebagaimana tersebut di atas, dapat terwujud karena mereka sudah menerima pelatihan dan melakukan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Disisi lain, guru-guru memiliki kualitas dan potensi untuk berkembang, misalnya dilihat dari tingkat pendidikan guru. Kesemuanya itu merupakan modal untuk berkembang. Namun, modal tersebut tidak akan memberikan kontribusi terhadap produktivitas sekolah apabila guru sebagai pemilik modal tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan potensinya. Ini berarti bahwa faktor kemampuan menjadi “power” yang mendorong guru memberdayakan potensinya sehingga implementasi kebijakan KTSP benar-benar terwujud

Hamalik (1995:57) berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui perlengkapan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan KTSP pada SMKN 1 Sarudu. Ketersediaan sarana dan prasarana pada SMKN 1 Sarudu kurang memadai, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan guru di SMK Negeri I Sarudu yang menyatakan bahwa sarana sangat kurang memadai. Artinya bahwa dalam

mengimplementasikan kebijakan KTSP pada SKMN 1 Sarudu kurang didukung dengan sarana dan prasarana sekolah yang memadai seperti ruangan laboratorium, perpustakaan dan alat-alat praktek tiap jurusan di dalam ruang maupun diluar ruangan. Disamping sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga tempat-tempat praktek tiap jurusan pada dunia industri dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Mamuju Utara kurang memadai.

Sehingga para guru mapun siswa dalam memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi kurang efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan KTSP pada lembaga pendidikan khususnya SMKN 1 Sarudu. Sarana dan prasarana yang terdapat pada SMKN 1 Sarudu dapat di lihat pada Tabel 2. beriku.

**Tabel 2. Keadaan Sarana dan Prasarana pada SMKN 1 Sarudu**

No	Sarana dan Prasana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang belajar	8 Kelas	Permanen
2	Laboratorium ATP	Ruang	Permanen
3	Lab Geologi	Ruang	Permanen
4	Laboratorium Komputer	Ruang	Permanen
5	Ruang Administrasi Kantor	Ruang	Permanen
6	Ruang Guru	1 Ruang	Permanen
7	Ruang Bimbingan Konseling	1 Ruang	Permanen
10	Perpustakaan	1 Ruang	Permanen
11	Ruang osis	1 Ruang	Permanen
12	Ruang KM/WC Kepala sekolah	-	Permanen
13	Ruang KM/WC Guru	-	Permanen
14	Ruang KM/WC Murid	1 Ruang	Permanen
15	Kantin	3 Ruang	Permanen
16	Lapangan Voly	1 Buah	Permanen
17	Lapangan Takraw	1 Buah	Permanen
18	Lapangan Fotsal	-	Permanen
19	Lapangan Tenis Meja	-	
20	Tempat Parkir Motor	-	Semi Permanen

Sumber Data : Tata Usaha SMKN 1 Sarudu 2015

Hal ini berarti bahwa sarana dan prasana sekolah selama proses pembelajaran kurang melakukan praktek di dalam ruangan maupun di luar ruangan sedangkan guru yang memilih memadai dan cukup memadai adalah guru yang mengajar mata pelajaran Adaptif dan Normatif yang memang kurang menggunakan alat-alat praktek, tidak seperti mata pelajaran produktif (mata pelajaran jurusan) yang selalu dituntut tiap habis materi harus melakukan praktek.

Dari pantauan peneliti menemukan bahwa komite SMKN 1 Sarudu kurang berperan dalam merumuskan KTSP, dengan tidak keefektifan komite sekolah dalam merumuskan KTSP mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan implementasi kebijakan KTSP yang dilakukan oleh SMKN 1 Sarudu. Sangat jelas bahwa dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu kerja sama yang baik dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun jika ada suatu komponen tidak berfungsi dalam suatu

organisasi akan mengalami kurangnya maksimal pelaksanaan bahkan terjadi terbelangkainya suatu tujuan.

### 3. Disposisi / Sikap

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III tidak terlepas dari disposisi/sikap Kepala Sekolah maupun Guru-guru SMKN 1 Sarudu. Disposisi/sikap adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi/sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (policy maker). Sebaliknya, jika implementor tidak memiliki sikap atau karakter yang baik akan berpengaruh negatif terhadap implementasi kebijakan KTSP.

Pada SMKN 1 Sarudu, *stakeholders* mempunyai komitmen yang kuat dalam mensukseskan semua program-program atau kegiatan di SMKN 1 Sarudu, antara lain berupa telah berupaya melakukan perumusan KTSP mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan RPP berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga implementasi kebijakan KTSP dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari proses tersebut menandakan bahwa semua *stakeholders* terlibat langsung secara efektif dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan kata lain bahwa *stakeholders* mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan implementasi KTSP tersebut. Ini di tunjukkan dengan keaktifan stakeholder seperti Kepala sekolah, semua wakasek, ketua-ketua program keahlian dan para guru-guru sangat berperan aktif apalagi dalam rapat-rapat program perencanaan kegiatan pelajaran dan pembagian tugas di SMK Negeri 1 Sarudu hampir semua para stakeholder hadir”.

### 4. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik ini dapat dilihat dengan adanya bimbingan dan pelatihan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari

Kabupaten tentang Implementasi KTSP untuk sekolah kejuruan juga telah dilakukan pelatihan-pelatihan melalui MKKS. Pada proses pelaksanaan KTSP di SMKN 1 Sarudu di butuhkan tindakan tegas atau bimbingan kepala sekolah dalam pelaksanaan Implementasi KTSP disekolah SMKN 1 Sarudu terhadap tugas-tugas guru yang tidak melaksanakan atau melalaikan proses pembelajaran di sekolah. Untuk. Seperti para wakil-wakil kepala sekolah dan penempatan ketua-ketua program keahlian pada masing-masing jurusan.

Penempatan guru dalam jajaran struktur organisasi SMKN 1 Sarudu mulai wakasek hingga ketua Jurusan, Kepala sekolah telah melakukan sesuai dengan kompotensinya masing2. Walaupun ada jurusan terpaksa dijabat dari guru lain karena guru Program keahlian jurusan tidak menetap di tempat. Hal ini dilakukan agar Implementasi KTSP tetap berjalan dengan baik walaupun kurang maksimal, Misalnya Ketua jurusan Geologi Pertambangan. Dari hasil wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Sarudu ( MR ) Menyatakan:

*“ Bahwa semua ketua program keahlian sudah sesuai dengan jurusan masing-masing walaupun ada satu jurusan program keahlian yang tidak sesuai dengan bidangnya tetapi guru tersebut mempunyai sedikit keahlian pada jurusan itu. (wawancara tanggal 12 desember 2015).*

Pembagian tugas untuk ketua-ketua program keahlian sudah sesuai begitu pula peneliti berpendapat bahwa ketua-ketua program keahlian sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing walaupun ada salah satu jurusan yang tidak diketuai oleh bidangnya akan tetapi mampu didalam penyusunan program-programm jurusannya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan tentang Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada



SMKN 1 Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1) Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMKN 1 Sarudu kurang berjalan efektif . Hal ini tidak sesuai teori Edward III tentang:

**a. Komunikasi;**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Sehubungan dengan teori Edward III, komunikasi di SMK N 1 Sarudu kurang intensif, sehingga menyebabkan lemahnya pengetahuan guru tentang implementasi materi KTSP disamping itu supervisi dan monitoring frekwensinya sangat rendah.

**b. Sumber Daya**

Di SMKN 1 Sarudu minimnya pelatihan KTSP sehingga guru memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengembangkan silabus dan RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Disamping itu anggaran sekolah yang tersedia kurang mencukupi dalam memaksimalkan sumber daya, khususnya menyiapkan sarana dan prasarana sekolah. sehingga Indikator Sumber daya kurang bagus , faktor ini sangat berpengaruh implementasi kebijakan KTSP di SMKN 1 Sarudu.

**c. Disposisi/Sikap.**

Indikator disposisi/sikap merupakan watak atau karakteristik Kepala Sekolah maupun Guru-guru SMK Negeri 1 Sarudu, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Hal ini berjalan cukup bagus sesuai hasil pengamatan dilapangan.

**d. Struktur Birokrasi.**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan KTSP di SMKN 1 Sarudu lemahnya pengawasan dan monitoring sehingga tidak berjalan sesuai yang telah di rumuskan pada saat perumusan KTSP awal tahun Ajaran pelajaran. Walaupun telah dibuat SOP ( Standart Operations Prosedur) dalam mengimplementasikan KTSP di SMKN 1 Sarudu. Struktur birokrasi tidak berfungsi secara maksimal hal ini tidak ada bimbingan langsung maupun tidak langsung dari Dinas Pendidikan, sehingga sebagian guru Produktif cenderung mencopy Paste Silabus dan RPP.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**Kesimpulan**

1.)Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMKN 1 Sarudu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya berjalan kurang sempurna. Karena faktor komunikasi tidak berjalan secara efektif dan intensif serta minimnya supervisi pada proses pelaksanaannya, Hal ini dibuktikan dengan teori Edward III , dengan 4 (empat) indikatornya yaitu : Komunikasi merupakan sarana yang dapat menghubungkan antara semua *stakeholder* yang terlibat dalam proses perumusan, pembelajaran dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP. Indikator Sumber daya , faktor ini sangat berpengaruh implementasi kebijakan, sumber daya manusia yang profesional dalam menggunakan sarana dan prasarana. Indikator disposisi/sikap merupakan watak

atau karakteristik Kepala Sekolah maupun Guru-guru SMK Negeri 1 Sarudu, seperti komitmen, kejujur, dan sifat demokratis. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi mendukung pelaksanaan Implementasi KTSP harus dibentuk struktur organisasi di sekolah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing guru.

- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMKN 1 Sarudu yakni terbatasnya dukungan bantuan anggaran yang tersedia dari Dinas Pendidikan kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi, untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana .
- 3) Faktor pendukung semua pengajar atau guru sudah berstrata satu(S1) . Serta motivasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMKN 1 Sarudu.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka perkenankanlah peneliti menyampaikan saran dengan pihak terkait, semoga bisa dijadikan acuan dalam proses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan khususnya Implementasi KTSP di SMKN 1 Sarudu, Adapun saran peneliti antara lain:

- 1) Dalam Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMKN 1 Sarudu peneliti menyarankan melakukan komunikasi yang efektif dengan Dinas Pendidikan, MKKS dan Komite sekolah agar diadakan pelatihan guru lebih intensif tentang penyusunan KTSP, Sesuai teori Edward III dalam pengembangannya.
- 2) Peneliti juga menyarankan kepada Pihak SMKN 1 Sarudu agar mengkomunikasikan dengan pihak terkait agar dilakukan peningkatan sumber daya yaitu memberikan kesempatan kepada guru melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi khususnya Kepala sekolah, sarana (peralatan) dan prasarana (bangunan) sekolah dengan mengutamakan peralatan

praktek siswa untuk program keahlian jurusan sebagai sarana fungsional karena merupakan kebutuhan mendasar bagi siswa dalam proses pembelajaran untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas serta keterampilan siswa.

- 3) SMK Negeri 1 Sarudu sebaiknya pro aktif mengkomunikasikan kepada Pemerintah daerah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat serta Dunia Usaha dan dunia Industri guna meningkatkan dukungan anggaran agar pelaksanaan Implementasi KTSP dapat terlaksana dan berjalan sesuai program pemerintah.
- 4) Peneliti menyarankan agar guru yang mengajar pada program keahlian jurusan benar-benar sesuai dengan kompetensi jurusannya agar menghasilkan tamatan atau lulusan yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan visi sekolah. Hal ini sesuai dengan teori Edward III tentang Sumber daya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini telah mendapat banyak bantuan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak terutama Ketua Tim pembimbing Dr. Syahrudin Hattab, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Ani Susanti, M.Si. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya penelitian yang lebih baik dikemudian hari.

### DAFTAR RUJUKAN

- Hamalik, Oemar. 1995. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hamdi, Muhclis, 1999, *Laporan Hasil Tim Studi Pengkajian Ilmu Pemerintahan*, IIP. Jakarta

- Miles, M. B. dan Huberman, M, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Pendidikan Nasional*
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*
- Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan*
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang *pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23/2006*
- Sugiono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodin, 2004. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta*
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan ,Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara*